

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

Abdurahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana press, 1983)

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan dan Pengeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*(Jakarta: Penerbit FH UI Press, 2004)

Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* , (Jakarta: Penerbit PSHTN, FH UI, 2002)

Brotodihardjo, Santoso. *Ilmu Hukum Pajak* (P.T. ERESKO Jakarta- Bandung, 1984)

Cappelletti, Mauro. *Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, (New York: Dobbs Ferry, 1975)

Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Kaligis, Otto Cornelis. *Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, cet ke-1, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2000)

Kusumaatmadja, Mochtar. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum (Bandung, Lembaga Penelitian

Hukum dan Kriminologi, fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Bina Cipta, 1975)

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit PSHTN-FH UI, 1998)

Loqan, Loebby. *Praperadilan di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1987)

Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986)

Marsono, *Susunandalam satu Naskah UUD 1945 dengan perubahan-perubahannya 1999-2002*, (Jakarta: Penerbit CV. Eka Jaya , 2003)

Metzger, Barry. *Legal Services to the poor and National Development Objectives*, dalam buku *Legal Aid and Word Poverty*, (Preger Publishers, 1974)

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan hukum dan Politik pembangunan* (Jakatra: LP3ES, 1982)

Nasution, Adnan Buyung. "*Lembaga Bantuan Hukum*", Kertas Kerja Pada kongres ke-III PERADILAN, Jakarta

Nurmatu, Safri dan Azhari A Samudra, *Dasar-Dasar Perpajakan*, cet ke-1 (Jakarta ; Pusat penerbitan Universitas Terbuka, 2002)

Pangaribuan, Luhut M.P. *Contemp of Court* , (Jakarta: Jambatan, 1996)

Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1986)

Prodjohamididjojo, Martiman. *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Soebekti, R. “*Etika Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri Jakarta*”. Departemen Penerangan Republik Indonesia , 1976

Soekanto , Soerjono. *bantuanHukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*. Cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983)

Soekanto, Soerjono, *Pegantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-7 (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003)

Senoadji, Oemar. *Kuhap Sekarang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 1985)

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1985)

Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politesia*, Bogor, tanpa tahun

Wlas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Waluyo, Bambang. *Tindak Pidana Perpajakan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)

Wantjik Saleh, K. *Tindak Pidana korupsi Dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Gramedia, 2000)

II. Skripsi/Tesis/Disertasi:

Abdullah Sayidin, "*Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan*", Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan III, (Universitas Indonesia 2009)

Adytiawarman, "*Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka didalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum*", (Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Hukum, (Universitas indonesia , 2006)

Yusriyadi, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan*". (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989)

III. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, LN No. 129 tahun 2000, TLN 3987

Indonesia, *Undang-undang Tentang Advokat*, UU No. 18, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4282

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman* UU No. 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 LN. No. 8 tahun 2004 TLN. No. 4358

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6. Tahun 1983 , LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 3984

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, LN, No. 129

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum* No. 16 Tahun 2011